

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PERHUBUNGAN
Jln. Kawasan Pemerintahan No. 1A
TOBELO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Berkat dan Rahmat sehingga penyusunan Rencana kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

Demikian Rencana Kerja (Renja) yang dapat kami buat, dengan harapan adanya masukan, saran maupun petunjuk bagi kami dalam penyusunan Renja Kerja ini. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik – baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Tobelo, 08 April 2024

Kepala Dinas



MUHAMMAD ASRI TAPI TAPI, SE, MMA

Pembina TK I/ IV.b

NIP. 19731228 2003 12 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan

**BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi
Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program Dan Kegiatan

**BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH**

BAB V. PENUTUP

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi Renja SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Renja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis PD. Dengan demikian Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra Perangkat Daerah dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP).

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut diatas maka Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara sebagai Perangkat Daerah (PD) pada tahun 2023 ini menyusun Rencana Kerja tahunan. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan PD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh PD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Tahun 2025 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 adalah :

1. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025 – 2029;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016, Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor ... Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024;
15. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 46 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
16. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor ... Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024.
17. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penetapan Rencana Kerja ini adalah secara khusus untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit organisasi di Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dan secara umum Renja Dinas Perhubungan Kab. Halut Tahun 2025 selaras dengan maksud dan tujuan Renstra yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

1. Program indikatif yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara
2. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Utara
3. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara

Tujuan penyusunan Renja ini adalah untuk menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal serta sebagai arah dan acuan dalam :

1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Menyusun Laporan Penilaian Kinerja (LKj).
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pada setiap tahun anggaran.
4. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan Kab. Halut.

1.4 SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan Rencana Kerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2. Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing – masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals); Tantangan dan peluang dalam meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah; Dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrembang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; Uraian rekapitulasi program dan kegiatan; dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



Menguraikan tentang: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah -kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis dimaksud. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dishub Kab. Halut ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dishub Kab. Halut selama tahun 2023, secara singkat dapat dijelaskan bahwa selama Tahun 2023 ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja dengan 3 (tiga) program dengan 18 kegiatan dan 36 sub kegiatan serta 2 (dua) sasaran strategis yang dilaksanakan pada tahun 2023. Pelaksanaan Program dan kegiatan selama tahun 2023 yang kami laksanakan tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Ada beberapa kegiatan yang terhambat dalam pelaksanaannya dan tidak dapat dilaksanakan tapi dengan melihat progres realisasi anggaran sebagian besar kegiatan dapat dilaksanakan dan berjalan sesuai yang direncanakan. **Pada Tahun 2023 total pagu anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara sesuai APBD-P tahun 2023 sebesar Rp. 13.383.035.658 dengan jumlah yang terealisasi sebesar Rp. 9.810.172.820 atau 73,3%, terdiri dari Belanja Operasi Rp.**

6.253.825.502 terealisasi sebesar Rp. 4.864.699.949 atau 77,8%, Belanja Modal Rp. 7.129.210.156 terealisasi sebesar Rp. 4.945.472.826 atau 69,4%. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi target Pendapatan Dinas Perhubungan Tahun 2023 sebesar Rp. 1.100.000.000, terealisasi sebesar Rp. 265.268.880 atau 24 %. Dan untuk pengukuran kinerja tahun berjalan belum dapat dievaluasi karena Renja 2025 disusun pada tahun 2024 dan hanya dicantumkan pada perkiraan target tahun 2024 saja. *(Secara jelas dapat dilihat pada tabel II.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun 2024).*

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan Dinas Perhubungan Kabupaten Halut yang membantu Bupati dalam mengsucceskan program dan kegiatan yang telah dicanangkan, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance. Pelayanan yang selama ini dilakukan belum sepenuhnya sempurna untuk melayani pengguna moda-moda transportasi baik darat, laut, maupun udara tapi paling tidak ada bentuk pelayanan yang selalu diberikan bagi masyarakat agar merasa aman, tertib, dan nyaman dalam berlalulintas. Kinerja yang selama ini ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara yaitu tidak lain adalah meningkatkan pelayanan jasa transportasi segala bidang bagi masyarakat pengguna transportasi umum, meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur-infrakstruktur transportasi dalam hal ini sarana dan prasarana yang berguna untuk memperlancar arus perekonomian dari desa ke kota ataupun sebaliknya, disamping perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang transportasi yang memiliki ketrampilan dan profesionalisme yang memadai dalam mengembangkan pelayanan jasa transportasi di Kabupaten Halmahera Utara.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kab. Halut dalam peningkatan kualitas pelayanan di bidang transportasi adalah sebagai berikut :

1. Infrastruktur transportasi publik yang pembangunannya belum merata di berbagai daerah.
2. Masih minimnya pelayanan transportasi kepelabuhanan baik pelabuhan laut maupun udara yang mencakup jaringan antar pulau maupun antar kota.
3. Perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas perencanaan, analisa dan pemetaan pembangunan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang kompleks;

4. Masih kurangnya koordinasi dengan masyarakat dan instansi terkait melalui pelaksanaan sosialisasi, forum komunikasi, maupun pelaksanaan kampanye keselamatan melalui berbagai media;
5. Perlu ditingkatkan pelaksanaan pengujian pengoperasian kendaraan bermotor sesuai dengan SOP yang berlaku.
6. Masih minimnya Sumber Daya Manusia/Personil Dinas Perhubungan yang berkompeten dan memiliki etos kerja yang profesional dan bertanggungjawab.

Berdasar evaluasi dari berbagai pencapaian sasaran-sasaran strategis Dinas Perhubungan yang dipaparkan diatas maka dapat dirangkum dalam Analisis terhadap Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara yang dapat dilihat pada lampiran.

(Tabel II.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD).

Pada kedua tabel yang disajikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Rasio kecelakaan Lalu lintas Angkutan Jalan (LLAJ)**

merupakan perbandingan antara jumlah kecelakaan tahun berkenaan dengan jumlah kendaraan tahun berkenaan dikali dengan 1000 kendaraan. 2 faktor penting yang berpengaruh terhadap penurunan kejadian kecelakaan di jalan yaitu : 1) Masyarakat pengguna transportasi patuh pada aturan – aturan berlalulintas yang berlaku; 2) Memiliki kesadaran dalam tertib berlalulintas, walaupun 100% tidak menjamin akan berkurangnya tingkat kecelakaan bila masyarakat pengguna transportasi secara betul memenuhi 2 faktor tersebut karna ada faktor – faktor lain juga yang ikut mempengaruhi di luar nalar kita misalnya saja faktor kelalaian diri sendiri di saat beraktivitas, tindakan nekat bunuh diri di jalan raya dan hal – hal lainnya. Akibat kecelakaan berdasarkan data yang diperoleh berturut – turut paling banyak didominasi akibat berkendara dengan kecepatan tinggi, mabuk waktu berkendara, jalanan yang licin, mengantuk/kecapean, kelebihan muatan, dan lalai dalam berkendara. Untuk Tahun 2023 bila dibandingkan dengan Tahun 2022 terjadi peningkatan kejadian kecelakaan dimana 52 kasus terjadi pada Tahun 2023 dan pada Tahun 2022 hanya 45 kasus. Faktor penyebabnya belum dipastikan seperti apa, angka indeks kepatuhan terhadap aturan berlalulintas di Kab. Halmahera Utara juga belum diketahui secara pasti. Tapi secara umum untuk menganalisa terjadinya peningkatan kejadian kecelakaan di Tahun 2023 faktor penyebabnya tiada lain karna meningkatnya aktivitas masyarakat pengguna transportasi yang tentu berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan, aturan-aturan berlalulintas yang belum dipatuhi dengan baik, dan kesadaran diri untuk tertib berlalulintas belum dimiliki oleh pengguna transportasi. Untuk ke depan ada hal – hal yang perlu

diperhatikan sebagai upaya menekan tingkat kecelakaan bertambah yaitu sosialisasi tentang kepatuhan dan ketertiban dalam berlalulintas sasarananya yaitu masyarakat pengguna transportasi perlu digalakan dan dilakukan secara intens, dan ini harus menjadi program/kegiatan prioritas yang perlu diperhatikan. Demikian juga untuk berbagai fasilitas kelengkapan jalan seperti rambu – rambu lalulintas, pagar pengaman jalan, markah jalan, traffic light dan fasilitas lainnya perlu dilengkapi.

Formulasi untuk indikator ini yaitu ***perbandingan antara jumlah kecelakaan tahun berkenaan dibagi dengan jumlah kendaraan tahun berkenaan dikali 1000.***

Sasaran strategis ini didukung oleh Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan kegiatan/Sub kegiatannya antara lain :

- Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas .
- Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota.

2. **Tingkat ketersediaan sarana & prasarana transportasi angkutan**

laut yaitu perbandingan antara jumlah sarana & prasarana laut tahun berkenaan dibagi dengan jumlah sarana dan prasarana angkutan laut selama 5 tahun. Sarana & prasarana transportasi angkutan laut berupa Terminal Penumpang pelabuhan, Pelabuhan Pengumpan Lokal (Tambatan Perahu), serta Dermaga.. Jumlah Sarana dan Prasarana yang telah ditargetkan tahun 2023 untuk disediakan tidak terealisasi karena kebijakan efisiensi anggaran karena defisit anggaran yang terjadi..

Formula dari indikator ini adalah ***perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana angkutan laut tahun berkenaan dengan jumlah total sarana dan prasarana angkutan selama 5(lima) tahun dikalikan 100%***. Tahun 2023 jumlah yang ditargetkan sebanyak 1 (satu) unit tambatan perahu dengan target indikator kinerja sebesar 27%.

Sasaran strategis ini didukung oleh Program Pengelolaan Pelayaran dengan kegiatan/sub kegiatannya antara lain :

- Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau

3. **Predikat SAKIP** merupakan nilai hasil akhir dari penyimpulan atas revidu yang dilakukan oleh Kementerian PANRB untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya. Secara berjenjang kategori kinerja meliputi: CC, C, B, BB, A, dan AA. Untuk nilai Sakip Dinas Perhubungan adalah Nilai dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dalam hal ini kinerja Dishub, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan

kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan pada DINas Perhubungan .

Sasaran strategis ini didukung oleh Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan/sub kegiatan antara lain :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Salah satu hal menarik yang perlu dipertanyakan yaitu sejauh mana peran Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara sebagai Perangkat Daerah yang berfungsi untuk memberikan pelayanan dalam bidang transportasi kepada masyarakat selama ini terutama masyarakat yang

terisolir dari wilayah kota. Tentu untuk menjawab hal ini kita berpatokan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan dan dilaksanakan melalui program/kegiatan prioritas yang selaras dengan program nasional melalui program/kegiatan kementerian. Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan Peningkatan pelayanan angkutan adalah program unggulan yang telah mendukung visi dan misi kepala daerah dan selaras dengan program nasional dalam menjalin konektivitas antar daerah dan mengatasi keterisoliran masyarakat. Hasil (Outcome) dari program unggulan tersebut telah berdampak langsung kepada masyarakat dengan meningkatnya pelayanan transportasi dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat yang jauh dari pusat kota. Output dari program – program tersebut antara lain pembangunan dermaga rakyat, pembangunan tambatan perahu, pembangunan jembatan penghubung antar desa, pengadaan transportasi perairan berupa longboat dan speed boat telah dilaksanakan di berbagai kecamatan di kabupaten halmahera utara dan telah dinikmati oleh masyarakat. Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan masyarakat tentu harus diantisipasi dengan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar yang diperlukan masyarakat, dan kelak hal kritis mungkin akan terjadi jika tidak ada keseimbangan pada kedua hal tersebut di atas dimana kurangnya infrastruktur dasar yang diperlukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

Permasalahan - permasalahan penting yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara selama ini antara lain yaitu Konektifitas jaringan jalan yang masih kurang, moda transportasi yang belum menjangkau semua interconnection antar wilayah, ketersediaan Sarana dan Prasarana infrastruktur perhubungan masih relatif rendah. Dan ini merupakan catatan penting yang perlu diperhatikan dan disikapi melalui pelaksanaan program/kegiatan prioritas yang berdampak langsung untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan transportasi dan bercermin dari berbagai permasalahan tersebut di atas kita diperhadapkan pada tantangan – tantangan yang antara lain yaitu meningkatnya aktifitas perekonomian masyarakat secara langsung berdampak pada perlunya peningkatan sarana dan prasarana perhubungan untuk menunjang aktifitas perekonomian tersebut agar daerah pedalaman dan daerah pesisir dapat terjangkau pelayanan transportasi, meningkatnya jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan berbanding terbalik dengan masih kurangnya volume jalan yang dibangun sehingga ke depan berpotensi mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan hal – hal lain juga yang berpengaruh pada upaya peningkatan pelayanan transportasi seperti jumlah anggaran yang masih terbatas dalam membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta minimnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki ketrampilan, wawasan yang luas, profesional dalam pekerjaan dan penguasaan teknologi.

Di samping itu ada berbagai peluang – peluang yang perlu dimanfaatkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara dalam upaya peningkatan pelayanan transportasi di daerah antara lain: Berkembangnya teknologi dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi hal-hal tersebut karena dapat mempermudah koordinasi dan menjalin kerjasama dengan daerah lain maupun dengan Pemerintah Pusat dalam memberikan pelayanan Transportasi kepada masyarakat secara baik, Program pemerintah pusat khususnya yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2025 – 2029 secara jelas akan melaksanakan program/kegiatan untuk pengembangan kawasan – kawasan di Indonesia Timur dan ini merupakan peluang yang sangat baik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara khususnya Dinas Perhubungan untuk mensinkronkan berbagai program dan kegiatan dengan kebijakan – kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Pusat. Pembangunan Dermaga, pelabuhan, tambatan perahu, jembatan penghubung, Terminal Penumpang ataupun sarana dan

prasarana moda transportasi lainnya dapat dibangun dengan kebijakan ini, dan perkembangan perekonomian daerah yang kian lama kian cepat dengan pertambahan jumlah penduduk cukup signifikan adalah modal besar untuk pengembangan daerah ini ke depan.

Dasar dari upaya peningkatan pelayanan transportasi di kabupaten halmahera utara disesuaikan dengan isu strategis pembangunan infrastruktur Transportasi Tahun 2025 – 2029 yang dicanangkan oleh Kementerian Perhubungan yang antara lain memuat :

1. Penguatan konektivitas Nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan.
2. Menjamin ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi dalam rangkai mendukung pengembangan wilayah.
3. Pengembangan sistem transportasi massal yang ramah lingkungan.
4. Pemenuhan pelayanan jasa transportasi sesuai dengan standar Pelayanan Minimum.
5. Peningkatan Kontribusi Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam pembangunan infrastruktur transportasi.

Berdasarkan isu-isu tersebut maka lahirlah kebijakan-kebijakan utama dan prioritas pembangunan yang salah satunya adalah meningkatkan aksesibilitas transportasi untuk Kawasan Timur Indonesia, wilayah perdesaan, perbatasan, perdalaman, dan wilayah terluar.

Terkait dengan hal tersebut maka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara dalam merencanakan program/kegiatan beberapa tahun ke depan perlu berpatokan pada hal-hal tersebut sehingga ada sinkronisasi program/kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terjabarkan di dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021 – 2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021 – 2026 yaitu : “ ***Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara melalui tata kelola Pemerintahan yang baik dan profesional dilandasi kebersamaan yang berkeadilan***” dimana sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera terjabarkan dalam Misi 2 yaitu “Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup.

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capainnya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Utara. Di samping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kab. Halut.

Selanjutnya Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada (*Tabel II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Halmahera Utara*)

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Terdapat usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui mekanisme Musrenbang Kecamatan dalam forum OPD dan disesuaikan dengan Program Prioritas sebagaimana tertuang dalam rancangan awal RKPD Tahun 2025 antara lain :

1. Program Pengelolaan Pelayaran; a. Usulan Pengadaan Sarana Transportasi laut Speed boat untuk 2 desa (Desa Dugasuli, desa Tuakara); b. Usulan Pembangunan Tambatan Perahu 6 unit berlokasi (Desa Tagalaya, desa Jere Tua, Cera, tobo –tobo, Dugasuli, Daru); Pembangunan Dermaga Laut 1 unit berlokasi (Desa Cera,); c. Rehabilitasi Tambatan Perahu 1 unit (Desa Kumo); d. Rehabilitasi Dermaga 1 unit (Desa Pediwang)

Selengkapnya dalam dilihat pada *(Tabel II.5. Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan)*

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara juga harus merujuk pada Rencana Kerja kementerian perhubungan dan kementerian kominfo dengan berbagai arah kebijakan nasional dan Program prioritas yang dicanangkan. Pembangunan perhubungan nasional sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional, mengingat kegiatan dibidang transportasi berperan penting dalam kegiatan distribusi barang dan jasa keseluruh pelosok tanah air dan antar negara. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perhubungan berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan infrastruktur Transportasi masih merupakan prioritas nasional dari presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mengembangkan transportasi dalam kurun waktu 2025-2029 adalah mengupayakan tersedianya infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal, pedalaman maupun perbatasan. Keterkaitan ini dapat dijelaskan secara rinci bahwa usaha jasa perhubungan sebagai bagian integral dari kegiatan perekonomian bangsa, mengemban fungsi aksesibilitas keseluruh wilayah tanah air sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Adapun visi Kementerian Perhubungan adalah **“Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal, Berdaya Saing Dan Memberikan Nilai Tambah.”**

Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman , selamat , nyaman , tepat waktu , terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri, dan produktif. Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi.
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah.
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi.
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi dibidang peraturan, kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan penegakkan hukum secara konsisten.
5. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Dalam pelaksanaan visi dan misi Kementerian Perhubungan tersebut diatas dituangkan tujuan sebagai berikut :

Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung

perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis.

Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan kemampuan pengembangan dan penerapan teknologi transportasi serta peningkatan kualitas SDM transportasi yang berdampak kepada maksimalisasi daya guna dan minimalisasi biaya yang menjadi beban masyarakat.

Sasaran pembangunan transportasi nasional tahun 2020-2024 adalah :

1. Mempercepat Pembangunan Sistem Transportasi Multimoda.
2. Mempercepat pembangunan Transportasi yang mendukung Sistem Logistik Nasional.
3. Melakukan upaya keseimbangan antara Transportasi yang berorientasi Nasional dengan Transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan.
4. Membangun kaitan sistem dan jaringan transportasi dengan investasi untuk mendukung koridor ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi.
5. Meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kesadaran penyelenggaraan Transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pelayanan transportasi publik dan membantu Bupati Kabupaten Halumahera Utara dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan telekomunikasi dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa sistem dan pengelolaan transportasi yang bertanggungjawab. Selanjutnya dapat dilihat pada *(tabel III.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan)*

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kab. Halmahera Utara, pada dasarnya kegiatan Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Utara adalah sebagai *"pelayanan umum bidang perhubungan"* setiap program dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menggunakan moda transportasi baik darat, laut maupun udara.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021 – 2026 yaitu ***"Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara melalui melalui tata kelola Pemerintahan yang baik dan profesional dilandasi kebersamaan yang berkeadilan"***. maka di tahun 2025 telah dirumuskan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dan prakiraan maju tahun 2026, selengkapnya dapat dilihat pada *tabel III.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026)*

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi adalah merupakan bentuk pengertian dari program yang dicanangkan oleh perangkat daerah. Sedangkan program pembangunan adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan kabupaten. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah.

Selengkapnya Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2025 yang direncanakan Dinas Perhubungan Kabupaten halmahera Utara dapat disajikan pada *tabel IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025*).

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara adalah Program Tahunan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara. Disamping juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan jajaran perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.



Tobelo, 08 April 2024

Kepala Dinas

MUHAMMAD ASRI TAPITAPI, SE, MMA

NIP. 19731228 2003 12 1 005

[illegible]

Tabel IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

2.15 URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN WAJIB YANG YIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.15.00.00.01 DINAS PERHUBUNGAN

KODE		PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	PRIORITAS
1		2	3	4	5	6
2.15.01	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (persen)	100%	6.628.865.197	
	I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (persen)	100%	9.507.091,00	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Renja	2 dok	5.038.696,00	Menengah
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja perangkat Daerah	2 dok	4.468.395,00	Menengah
	I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (persen)	100%	4.415.070.648,00	
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	50 OB	4.415.070.648,00	Tinggi
	I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan pengelolaan BMD pada perangkat daerah (persen)	100%	4.468.395,00	
		1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 lap	4.468.395	Menengah
	I.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (persen)	100%	115.000.000,00	
		1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut & kelengkapannya	1 pkt	80.000.000	Menengah
		2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 org	35.000.000	Menengah
	I.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi umum Perangkat Daerah (persen)	100%	422.445.763,00	
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik & penerangan	1 pkt	4.625.000,00	Tinggi
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor	1 pkt	64.805.000,00	Menengah
		3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 pkt	25.063.763,00	Menengah
		4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan pengandaan	1 pkt	62.788.000,00	Menengah
		5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2 dok	16.200.000,00	Menengah
		6 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan dan Minum	1 lap	19.680.000,00	Menengah
		7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 lap	229.284.000,00	Menengah

KODE	PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	PRIORITAS
1	2		3	4	5	6
	I.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (persen)	100%	805.000.000,00	
		1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 unit	435.000.000	Menengah
		2 Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeulair	7 unit	65.000.000	Menengah
		3 Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Pengadaan Aplikasi)	Tersedianya Aset tetap lainnya	1 unit	305.000.000	Tinggi
	I.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)	100%	210.750.000,00	
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 lap	69.840.000,00	Tinggi
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 lap	68.400.000,00	Tinggi
		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 lap	72.510.000,00	Menengah
	I.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)	100%	646.623.300,00	
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 tahun	122.692.300,00	Menengah
		2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa service & perbaikan peralatan kerja	1 tahun	18.000.000,00	Menengah
		3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	505.931.000,00	Menengah
2.15.02	II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio kecelakaan LLAJ (per 1000 kendaraan)	8,8%	1.865.952.680	
			Rasio Izin Trayek (per 1000 Penduduk)	0,95%		
	II.1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (persen)	100%	185.000.000,00	
		1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ	1 dok	185.000.000,00	Menengah
	II.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (persen)	100%	445.000.000,00	
		1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	18 unit	445.000.000,00	Menengah
	II.3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Cakupan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C (persen)	100%	180.000.000,00	
		1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	4 unit	180.000.000,00	Menengah

KODE		PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	PRIORITAS
1		2		3	4	5	6
	II.4	Pengujian Kendaraan Bermotor		Cakupan pelaksanaan pengujian kendaraan Bermotor (persen)	100,0%	108.781.000,00	
		1	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 dok	24.000.000,00	Menengah
		2	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	lap		
		3	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 lap		
		4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	7 unit	50.000.000,00	Menengah
		5	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 lap	34.781.000,00	Menengah
		6	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 lap		
	II.5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Tingkat Realisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (persen)	100%	158.676.680,00	
		1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 lap		
		2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terlaksananya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	35 unit	53.676.680,00	Menengah
		3	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 lap	105.000.000	Menengah
	II.6	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Cakupan Pelaksanaan Audit & Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan (persen)	100%	25.000.000,00	
		1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Inspeksi, Audit & Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1 lap		
		2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 lap	10.000.000	Menengah
		3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 lap	15.000.000	Menengah
	II.7	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tingkat Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (persen)	100%	185.000.000,00	
		1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 unit	165.000.000	Menengah

KODE		PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	PRIORITAS
1		2		3	4	5	6
		2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 lap	20.000.000	Menengah
	II.8	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Kegiatan Penertiban Trayek (Angkot, Angkutan Barang)	4 keg	563.495.000,00	
		1	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 lap	471.570.000,00	Menengah
		2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	2 lap	91.925.000,00	Tinggi
	II.9	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Pelaksanaan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (persen)	100%	15.000.000,00	
		1	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	15.000.000	Menengah
		2	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 lap		
2.15.02	III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Pertumbuhan volume penumpang angkutan laut/pelayaran (persen)	21%	6.999.601.770	
				Pertumbuhan volume barang angkutan laut/pelayaran (persen)	11%		
	III.1	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Tingkat realisasi Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota (persen)	100%	20.000.000,00	
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 lap	20.000.000,00	Menengah

KODE		PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	PRIORITAS
1		2		3	4	5	6
	III.2	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (persen)	100%	24.000.000,00	
		1	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	24.000.000	Menengah
		2	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 lap		
	III.3	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (persen)	100%	49.000.000,00	
		1	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	25.000.000	Menengah
		2	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	24.000.000	Menengah
		3	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	1 lap		
	III.4	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal		Cakupan Ketersediaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal (persen)	100%	55.000.000,00	
		1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersusunnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 dok	55.000.000	Menengah
	III.5	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		Tingkat Realisasi Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (persen)	2 unit	832.038.450,00	
		1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 dok		

KODE	PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	PRIORITAS
1	2		3	4	5	6
	2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 unit	426.278.450,00	Menengah
	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 unit	381.760.000	Menengah
	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 lap	24.000.000	Menengah
	III.6	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Tingkat Realisasi Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau (persen)	100%	6.019.563.320,00	
	1	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau	1 unit	4.009.942.770,00	
	2	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	1 keg	2.009.620.550,00	
		TOTAL BELANJA			15.494.419.647,0	-

Tabel II.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

2.15 URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN WAJIB YANG YIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.15.00.00.01 DINAS PERHUBUNGAN

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING	
KODE	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10		11
2.15.01	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Halut	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (persen)	100%	6.628.865.197	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Halut	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (persen)	100%	6.838.865.197	
	I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor DISHUB	Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (persen)	100%	9.507.091	I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor DISHUB	Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (persen)	100%	9.507.091	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tobelo	Tersedianya dokumen Renja	2 dok	5.038.696		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tobelo	Tersedianya dokumen Renja	2 dok	5.038.696	
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tobelo	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja perangkat Daerah	2 dok	4.468.395		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tobelo	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja perangkat Daerah	2 dok	4.468.395	
	I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tobelo	Tingkat realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (persen)	100%	4.415.070.648	I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tobelo	Tingkat realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (persen)	100%	4.415.070.648	
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tobelo	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	50 OB	4.415.070.648		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tobelo	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	50 OB	4.415.070.648	
	I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tobelo	Cakupan pengelolaan BMD pada perangkat daerah (persen)	100%	4.468.395	I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tobelo	Cakupan pengelolaan BMD pada perangkat daerah (persen)	100%	4.468.395	
		1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tobelo	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 lap	4.468.395		1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tobelo	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 lap	4.468.395	
	I.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tobelo	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (persen)	100%	115.000.000	I.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tobelo	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (persen)	100%	115.000.000	
		1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tobelo	Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut & kelengkapannya	1 pkt	80.000.000		1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tobelo	Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut & kelengkapannya	1 pkt	80.000.000	
		2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tobelo	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 org	35.000.000		2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tobelo	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 org	35.000.000	
	I.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tobelo	Cakupan Administrasi umum Perangkat Daerah (persen)	100%	422.445.763	I.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tobelo	Cakupan Administrasi umum Perangkat Daerah (persen)	100%	422.445.763	
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tobelo	Tersedianya komponen listrik & penerangan	1 pkt	4.625.000		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tobelo	Tersedianya komponen listrik & penerangan	1 pkt	4.625.000	
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tobelo	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor	1 pkt	64.805.000		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tobelo	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor	1 pkt	64.805.000	
		3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tobelo	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 pkt	25.063.763		3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tobelo	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 pkt	25.063.763	
		4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tobelo	Tersedianya barang cetakan & penggandaan	1 pkt	62.788.000		4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tobelo	Tersedianya barang cetakan & penggandaan	1 pkt	62.788.000	
		5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tobelo	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 dok	16.200.000		5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tobelo	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 dok	16.200.000	
		6 Fasilitas Kunjungan Tamu	Tobelo	Tersedianya Makan dan Minum	1 lap	19.680.000		6 Fasilitas Kunjungan Tamu	Tobelo	Tersedianya Makan dan Minum	1 lap	19.680.000	
		7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tobelo	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 lap	229.284.000		7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tobelo	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 lap	229.284.000	
	I.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tobelo	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (persen)	100%	805.000.000	I.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tobelo	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (persen)	100%	815.000.000	
		1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tobelo	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	435.000.000		1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tobelo	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	435.000.000	
		2 Pengadaan Mebel	Tobelo	Tersedianya Mebeulair	7 unit	65.000.000		2 Pengadaan Mebel	Tobelo	Tersedianya Mebeulair	7 unit	75.000.000	
		3 Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Pengadaan Aplikasi)	Tobelo	Tersedianya Aset tetap lainnya	1 unit	305.000.000		3 Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Pengadaan Aplikasi)	Tobelo	Tersedianya Aset tetap lainnya	1 unit	305.000.000	
	I.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tobelo	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)	100%	210.750.000	I.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tobelo	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)	100%	210.750.000	
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tobelo	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 lap	69.840.000		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tobelo	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 lap	69.840.000	
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tobelo	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 lap	68.400.000		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tobelo	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 lap	68.400.000	
		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tobelo	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 lap	72.510.000		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tobelo	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 lap	72.510.000	
	I.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tobelo	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)	100%	646.623.300	I.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tobelo	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)	100%	846.623.300	
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tobelo	Terpeliharanya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 tahun	122.692.300		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tobelo	Terpeliharanya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 tahun	122.692.300	

RANCANGAN AWAL RKPd						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							CATATAN PENTING		
KODE		PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
1		2		3	4	5	6	7		8	9	10		11	12
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tobelo	Tersedianya jasa service & perbaikan peralatan kerja	1 tahun	18.000.000		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tobelo	Tersedianya jasa service & perbaikan peralatan kerja	1 tahun	18.000.000	
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tobelo	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	505.931.000		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tobelo	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	705.931.000	
2.15.02	II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Kab. Halut	Rasio kecelakaan LLAJ (per 1000 kendaraan)	8,8%	1.865.952.680	II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Kab. Halut	Rasio kecelakaan LLAJ (per 1000 kendaraan)	8,8%	2.060.952.680	
					Rasio izin Trayek (per 1000 Penduduk)	0,95%						Rasio izin Trayek (per 1000 Penduduk)	0,95%		
	II.1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Tobelo	Tingkat ketersediaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (persen)	100%	185.000.000	II.1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Tobelo	Tingkat ketersediaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (persen)	100%	185.000.000	
	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Tobelo	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ	1 dok	185.000.000	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Tobelo	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ	1 dok	185.000.000	
	II.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Tobelo	Tingkat ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (persen)	100%	445.000.000	II.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Tobelo	Tingkat ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (persen)	100%	545.000.000	
	1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Tobelo	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	10 unit	445.000.000	1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Tobelo	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	10 unit	545.000.000	
	II.3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Kab. Halut	Cakupan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C (persen)	100%	180.000.000	II.3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Kab. Halut	Cakupan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C (persen)	100%	180.000.000	
	1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		Galela, Tobelo Utara, Tobelo, Malifut	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	4 unit	180.000.000	1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		Galela, Tobelo Utara, Tobelo, Malifut	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	4 unit	180.000.000	
	II.4	Pengujian Kendaraan Bermotor		Tobelo	Cakupan pelaksanaan pengujian kendaraan Bermotor (persen)	100,0%	108.781.000	II.4	Pengujian Kendaraan Bermotor		Tobelo	Cakupan pelaksanaan pengujian kendaraan Bermotor (persen)	100,0%	143.781.000	
	1	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Tobelo	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 dok	24.000.000	1	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Tobelo	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 dok	24.000.000	
	2	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Tobelo	Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	lap		2	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Tobelo	Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	lap		
	3	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji		Tobelo	Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 lap		3	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji		Tobelo	Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 lap	25.000.000	
	4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Tobelo	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	7 unit	50.000.000	4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Tobelo	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	7 unit	50.000.000	
	5	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Tobelo	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 lap	34.781.000	5	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Tobelo	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 lap	34.781.000	
	6	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Tobelo	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 lap		6	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Tobelo	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 lap	10.000.000	
	II.5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Kab. Halut	Tingkat Realisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (persen)	100%	158.676.680	II.5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Kab. Halut	Tingkat Realisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (persen)	100%	173.676.680	
	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Tobelo	Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 lap		1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Tobelo	Tertatnyaana Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 lap	15.000.000	
	2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		Galela, Tobelo, Kao Barat, Malifut	Terlaksananya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	35 unit	53.676.680	2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		Galela, Tobelo, Kao Barat, Malifut	Terlaksananya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	35 unit	53.676.680	
	3	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		Tobelo	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 lap	105.000.000	3	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		Tobelo	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 lap	105.000.000	
	II.6	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Kab. Halut	Cakupan Pelaksanaan Audit & Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan (persen)	100%	25.000.000	II.6	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Kab. Halut	Cakupan Pelaksanaan Audit & Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan (persen)	100%	55.000.000	
	1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor		Tobelo	Terlaksananya Inspeksi, Audit & Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1 lap		1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor		Tobelo	Terlaksananya Inspeksi, Audit & Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1 lap	30.000.000	
	2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		Tobelo	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 lap	10.000.000	2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		Tobelo	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 lap	10.000.000	
	3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		Tobelo	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 lap	15.000.000	3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		Tobelo	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 lap	15.000.000	
	II.7	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Halut	Tingkat Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (persen)	100%	185.000.000	II.7	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Halut	Tingkat Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (persen)	100%	185.000.000	
	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tobelo	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 unit	165.000.000	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tobelo	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 unit	165.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							CATATAN PENTING	
KODE		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF			
1		2	3	4	5	6	7		8	9		10	11		12
	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Tobelo	Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 lap	20.000.000	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Tobelo	Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 lap	20.000.000			
	II.8	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Halut	Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Trayek (Angkot, Angkutan Barang)	4 keg	563.495.000	II.8	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Halut	Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Trayek (Angkot, Angkutan Barang)	4 keg	563.495.000			
	1	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Tobelo	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 lap	471.570.000	1	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Tobelo	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 lap	471.570.000			
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Tobelo	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	2 lap	91.925.000	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Tobelo	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	2 lap	91.925.000			
	II.9	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Halut	Cakupan Pelaksanaan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (persen)	100%	15.000.000	II.9	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Halut	Cakupan Pelaksanaan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (persen)	100%	30.000.000			
	1	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	15.000.000	1	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	15.000.000			
	2	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 lap		2	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 lap	15.000.000			
2.15.02	III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Kab. Halut	Pertumbuhan volume penumpang angkutan laut/pelayaran (persen)	21%	6.999.601.770	III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Kab. Halut	Pertumbuhan volume penumpang angkutan laut/pelayaran (persen)	21%	7.094.222.320			
				Pertumbuhan volume barang angkutan laut/pelayaran (persen)	11%					Pertumbuhan volume barang angkutan laut/pelayaran (persen)	11%				
	III.1	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Halut	Tingkat realisasi Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota (persen)	100%	20.000.000	III.1	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Halut	Tingkat realisasi Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota (persen)	100%	20.000.000			
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Tobelo	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 lap	20.000.000	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Tobelo	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 lap	20.000.000			
	III.2	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Halut	Cakupan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (persen)	100%	24.000.000	III.2	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Halut	Cakupan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (persen)	100%	70.000.000			
	1	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	24.000.000	1	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	45.000.000			
	2	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 lap		2	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 lap	25.000.000			
	III.3	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Halut	Cakupan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (persen)	100%	49.000.000	III.3	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Halut	Cakupan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (persen)	100%	145.000.000			
	1	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	Terlaksananya Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	25.000.000	1	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	Terlaksananya Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	75.000.000			
	2	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	24.000.000	2	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	50.000.000			

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							CATATAN PENTING
KODE		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
1		2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
	3	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kot	Tobelo	Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	1 lap		3	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kot	Tobelo	Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	1 lap	20.000.000	
	III.4	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Halut	Cakupan Ketersediaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal (persen)	100%	55.000.000	III.4	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Halut	Cakupan Ketersediaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal (persen)	100%	200.000.000	
	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tobelo	Tersusunnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 dok	55.000.000	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tobelo	Tersusunnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 dok	200.000.000	
	III.5	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Halut	Tingkat Realisasi Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (persen)	2 unit	832.038.450	III.5	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Halut	Tingkat Realisasi Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (persen)	2 unit	639.659.000	
	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kec. Tobelo	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 dok		1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kec. Tobelo	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 dok	15.000.000	
	2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kec. Tobelo	Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 unit	426.278.450	2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kec. Tobelo	Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 unit	428.779.000	
	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kec. Tobelo	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 unit	381.760.000	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kec. Tobelo	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 unit	160.880.000	
	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kec. Tobelo	Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 lap	24.000.000	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kec. Tobelo	Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 lap	35.000.000	
	III.6	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Halut	Tingkat Realisasi Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau (persen)	100%	6.019.563.320	III.6	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Halut	Tingkat Realisasi Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau (persen)	100%	6.019.563.320	
	1	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Tobelo Utara	Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau	1 unit	4.009.942.770	1	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Tobelo Utara	Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau	1 unit	4.009.942.770	
	2	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Tobelo Utara	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	1 keg	2.009.620.550	2	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Tobelo Utara	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	1 keg	2.009.620.550	
		TOTAL BELANJA				15.494.419.647		TOTAL BELANJA				15.994.040.197	

Tabel III.3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

2.15 URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN WAJIB YANG YIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.15.00.00.01 DINAS PERHUBUNGAN

KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)					SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025					
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF				
						APBD II	APBD I	APBN				APBD II	APBD I	APBN		
1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.15.01	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (persen)		Kab. Halut	90%	5.456.192.118					100%	5.684.032.462		
	I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (persen)		Kantor DISHUB	100%	15.037.100					100%	9.507.091,00		
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tobelo	2 dok	10.569.400			DAU		2 dok	5.038.696,00		
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tobelo	2 dok	4.467.700			DAU		2 dok	4.468.395,00		
	I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (persen)		Tobelo	100%	4.716.358.418					100%	4.716.358.913		
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		Tobelo	50 OB	4.711.890.518			DAU		50 OB	4.711.890.518,00		
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Tobelo	2 lap	4.467.900			DAU		2 lap	4.468.395		
	I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		prosentase BMD pada perangkat daerah yg tercatat pada SIMDA (persen)		Tobelo	100%	4.467.900					100%	4.468.395,00		
		1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Tobelo	2 lap	4.467.900			DAU		2 lap	4.468.395		
	I.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (persen)		Tobelo	100%	51.332.000					100%	65.000.000,00		
		1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Tobelo	2 org	29.628.000			DAU		2 org	30.000.000		
		2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Tobelo	2 org	21.704.000			DAU		3 org	35.000.000		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)					SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
						APBD II	APBD I	APBN				APBD II	APBD I	APBN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	I.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi umum Perangkat Daerah (persen)	Tobelo	100%	384.144.900					100%	447.405.763,00		
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik & penerangan	Tobelo	1 pkt	4.846.000			DAU		1 pkt	4.625.000,00		
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor	Tobelo	1 pkt	41.187.000			DAU		1 pkt	67.949.000,00		
		3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Tobelo	1 pkt	26.327.500			DAU		1 pkt	25.063.763,00		
		4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan & pengandaan	Tobelo	1 pkt	65.926.400			DAU		1 pkt	62.788.000,00		
		5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tobelo	2 dok	16.900.000			DAU		2 dok	16.200.000,00		
		6 Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan dan Minum	Tobelo	1 lap	20.674.000			DAU		1 lap	19.680.000,00		
		7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tobelo	36 lap	208.284.000			DAU		39 lap	251.100.000,00		
	I.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (persen)	Tobelo	100%	-					100%	75.000.000,00		
		1 Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeulair	Tobelo	unit				DAU		6 unit	75.000.000		
		2 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset tetap lainnya	Tobelo	unit						unit			
		3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tobelo	unit				DAU		unit			
	I.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)	Tobelo	100%	139.553.600					100%	220.600.000,00		
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tobelo	9 lap	34.920.000			DAU		9 lap	74.200.000,00		
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tobelo	3 lap	60.825.000			DAU		3 lap	72.500.000,00		
		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tobelo	1 lap	43.808.600			DAU		1 lap	73.900.000,00		
	I.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)	Tobelo	100%	145.298.200					100%	145.692.300,00		
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tobelo	9 unit	122.688.200			DAU		9 unit	122.692.300		
		2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tobelo	16 unit	22.610.000			DAU		16 unit	23.000.000		
		3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tobelo	unit						unit			

KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)					SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
							APBD II	APBD I	APBN				APBD II	APBD I	APBN
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.15.02	II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Rasio Izin Trayek (per 1000 Penduduk)	Kab. Halut	1,00	1.508.655.177					1,00	2.976.869.000		
	II.1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Jumlah Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan	Tobelo	2 dok	65.043.000					2 dok	-		
		1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Tobelo	1 dok	65.043.000			DAU		1 dok			
	II.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten (persen)	Tobelo	31,2%	500.500.000					31,2%	98.000.000,00		
		1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tobelo	1 unit	500.500.000			DAU		1 unit	98.000.000		
		2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tobelo	unit				DAU		28 unit	345.000.000		
		3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Tobelo	unit				DAU		3 unit	65.000.000		
	II.3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Persentase Terminal Penumpang Tipe C yang dikelola (persen)	Kab. Halut	80%	130.000.000					80%	1.190.000.000,00		
		1	Pembangunan Gedung Terminal	Terbangunnya Gedung Terminal	Tobelo	1 unit				DAU		1 unit	1.190.000.000,00		
		2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Galela, Tobelo Utara, Tobelo, Malifut	4 unit	130.000.000			DAU		4 unit	195.000.000,00		
	II.4	Pengujian Kendaraan Bermotor		Persentase Kendaraan Bermotor yang diuji KIR (persen)	Tobelo	88,5%	109.781.000					100,0%	249.781.000,00		
		1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tobelo	org				DAU		2 org	30.000.000,00		
		2	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tobelo	1 dok	24.000.000			DAU		1 dok	24.000.000,00		
		3	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tobelo	lap						1 lap	100.000.000,00		
		4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tobelo	7 unit	50.000.000			DAU		7 unit	50.000.000,00		
		5	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tobelo	1 lap	35.781.000			DAU		1 lap	35.781.000,00		
		5	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tobelo	lap				DAU		1 lap	10.000.000,00		

[illegible]

KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)					SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
							APBD II	APBD I	APBN				APBD II	APBD I	APBN
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	II.9	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah jaringan Trayek Perkotaan	Kab. Halut	30 trayek	-					100%	50.000.000,00		
		1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	dok				DAU		1 dok	35.000.000		
		2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	lap				DAU		1 lap	15.000.000		
	II.10	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Prosentasi Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten (persen)	Kab. Halut	17,1%	467.173.000					16,8%	563.495.000,00		
		1	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tobelo	2 lap	375.687.000			DAU		2 lap	471.570.000,00		
		2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Tobelo	2 lap	91.486.000			DAU		2 lap	91.925.000,00		
	II.11	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya regulasi Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Halut	1 dok	15.000.000					100%	30.000.000,00		
		1	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	1 dok	15.000.000			DAU		1 dok	15.000.000		
		2	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	lap						1 lap	15.000.000		
2.15.02	III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Pertumbuhan volume penumpang angkutan laut/pelayaran (persen)	Kab. Halut	21%	2.124.515.797					21%	20.272.480.625		
				Pertumbuhan volume barang angkutan laut/pelayaran (persen)		11%						11%			

KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025				
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF			
							APBD II	APBD I				APBN	APBD II	APBD I	APBN
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	III.1	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Halut	1 keg	15.000.000					1 keg	40.000.000,00		
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Tobelo	1 lap	15.000.000			DAU		1 lap	40.000.000,00		
	III.2	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Halut	1 keg	15.000.000					1 keg	20.000.000,00		
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Tobelo	1 lap	15.000.000			DAU		1 lap	20.000.000,00		
	III.3	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (persen)	Kab. Halut	100%	15.000.000					100%	60.000.000,00		
		1	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	1 dok	15.000.000			DAU		1 dok	25.000.000		
		2	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	lap						1 lap	35.000.000		
	III.4	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya regulasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Halut	1 dok	-					1 dok	20.000.000,00		

KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025					
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF				
							APBD II				APBD I	APBN	APBD II	APBD I	APBN
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	dok				DAU		dok			
		2	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	dok				DAU		dok			
		3	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kot	Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	lap						1 lap	20.000.000		
	III.5	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		Tingkat Realisasi Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (persen)	Kab. Halut	2 unit	2.079.515.797					2 unit	10.096.875.856,00		
		1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kec. Tobelo	dok						1 dok	25.000.000,00		
		2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kec. Tobelo, lokep	2 unit	1.456.903.974			DAK		3 unit	6.411.162.000,00		
		3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kec. Tobelo	3 unit	562.599.000			DAK		3 unit	3.600.713.856		
		4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kec. Tobelo	1 lap	60.012.823			DAK		1 lap	60.000.000		
	III.6	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		Tingkat Realisasi Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau (persen)	Kab. Halut	100%	-					100%	10.075.604.769,00		
		1	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau	Tobelo Utara	unit						1 unit	6.000.000.000,00		
		2	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Tobelo Utara	keg						1 keg	4.075.604.769,00		
			TOTAL BELANJA				9.089.363.092	-					28.933.382.087,0		

Tabel III.2

**TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN PADA TAHUN	
			2024	2025
Mewujudkan infrastruktur transportasi yang handal serta kapasitas dan kualitas layanan transportasi antar wilayah	Meningkatnya kepatuhan dan ketertiban berlalulintas	Rasio kecelakaan LLAJ (per 1000 kendaraan)	8,2	7,6
	Meningkatnya fasilitas transportasi antar wilayah	Tingkat ketersediaan sarana & prasarana transportasi angkutan laut	29,5%	32,5%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perhubungan	BB	BB

Tabel II.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN KAB. HALUT

NO	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2		3	4	5	6
I	Program Pengelolaan Pelayaran					
	1	Pengadaan Sarana Transportasi Laut (Speed Boat)	Tuakara, Dugasuli	Tersedianya 2 unit speed boat	2 unit	Tidak terakomodir
II	Program Pengelolaan Pelayaran					
	1	Pembangunan Tambatan Perahu	Desa Cera	Tersedianya 1 unit tambatan perahu (50 m)	1 unit	diakomodir dalam APBD II
	2	Pembangunan Dermaga	Desa Cera	Tersedianya 1 unit Dermaga	1 unit	diusulkan dalam APBD I dan APBN
	3	Pembangunan Tambatan Perahu	Desa Tagalaya	Tersedianya 1 unit tambatan perahu (200 m)	1 unit	diakomodir dalam APBD II
	4	Pembangunan Tambatan Perahu	Desa Jere Tua	Tersedianya 1 unit tambatan perahu (75 m)	1 unit	diusulkan dalam APBD I dan APBN
	5	Pembangunan Tambatan Perahu	Desa Tobo - Tobo	Tersedianya 1 unit tambatan perahu	1 unit	diusulkan dalam APBD I dan APBN
	6	Pembangunan Tambatan Perahu	Desa Dugasuli	Tersedianya 1 unit tambatan perahu	1 unit	diusulkan dalam APBD I dan APBN
	7	Pembangunan Tambatan Perahu	Desa Daru	Tersedianya 1 unit tambatan perahu	1 unit	diusulkan dalam APBD I dan APBN
	8	Rehabilitasi Tambatan Perahu	Desa Kumo	Terpeliharanya 1 unit Tambatan Perahu	1 unit	diakomodir dalam APBD I
	9	Rehabilitasi Dermaga	Desa Pediwang	Terpeliharanya 1 unit Dermaga	1 unit	diusulkan dalam APBD I
III	Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan					
	1	Rehabilitasi Terminal Malifut	Desa Soma	Terpeliharanya 1 unit terminal penumpang	1 unit	diakomodir dalam APBD II
USULAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA UTARA						

Tabel II.2
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

NO	INDIKATOR	STANDAR/ SPM NASIONAL	IKK (PP-6/08)	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI				CATATAN ANALISIS
				Tahun 2021 (tahun n- 2)	Tahun 2022(tah un n-1)	Tahun 2023(tah un n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n- 2)	Tahun 2022 (tahun n- 1)	Tahun 2023 (tahun 1)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rasio kecelakaan LLAJ (per 1000 kendaraan)			10	9,4	8,8	8,20	5,74	7,28	7,82	8	
2	Tingkat ketersediaan sarana & prasarana transportasi angkutan laut			23,0%	25,0%	27,0%	29,5%	0,0%	0,0%	0,0%	29,5%	
3	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perhubungan			C	B	B	BB	D	C	CC	B	

Tabel T-B.36
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PROGRAM PRIORITAS
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	TAHUN 2023		INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR - FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		TARGET CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
1	2	5	6	7	8	9
1	URUSAN WAJIB					
1.07	PERHUBUNGAN					
	1	Rasio kecelakaan LLAJ (per 1000 kendaraan)	8,8	7,82	INTERPRETASI MELAMPAUI (>)	
	2	Tingkat ketersediaan sarana & prasarana transportasi angkutan laut	27,0%	0,0%	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI	
	3	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perhubungan	B	CC	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI	